

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA BOJONEGORO DALAM MENDUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Galuh Primadhayanti

NPP. 29.0942

Asdaf Kabupaten Bojonegoro , Provinsi Jawa Timur

Program Studi Kebijakan Publik

Email : madhagaluh02@gmail.com

ABSTRACT

Problems/Background (GAP) : The Bojonegoro Regency Government realizes public information disclosure through One Data Bojonegoro. However, in the existing implementation, there are still many people of Bojonegoro Regency who do not understand the usefulness, and do not even understand that there is an application called Satu Data Bojonegoro which is useful as a means of publishing public information and data related to the Bojonegoro Regency Government. One Bojonegoro Data so far is only known and used by the public who are directly related to this policy, there are still many people who do not know what One Data Bojonegoro is, especially even though they know that there are still many people who do not understand the use of One Bojonegoro data. **Purpose:** aims to determine the Implementation of One Data Bojonegoro in supporting information disclosure in Bojonegoro Regency, inhibiting and driving factors as well as the efforts of the Communication and Informatics Service of Bojonegoro Regency in overcoming inhibiting factors. **Method:** Using a qualitative approach with a descriptive method. to obtain results and discoveries that correspond to the phenomena in the field in the form of descriptions, descriptions, factual and accurate. Authors obtain data through observation, interviews, documentation, and triangulation. Then perform data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The implementation of One Bojonegoro Data in Bojonegoro Regency, East Java Province, after the research was carried out, this is because there are still 2 dimensions in the study, namely the resource dimension and the communication dimension which are still not running well **Conclusion:** The obstacles encountered in the implementation of One Data Bojonegoro in Bojonegoro Regency, East Java Province, namely, communication established internally by local governments in the context of coordination has not been carried out, nor external communication carried out by the government has not yet reached the target target. The socialization carried out to residents still does not cover all layers, There are still some residents who are reluctant to participate because of the lack of citizen knowledge about information technology and internet networks, the limited number of employees as needed in data processing contained in the Communication and Informatics Service of Bojonegoro Regency, Limited employees who understand IT in sub-districts and OPD as the implementer of data input, Unstable internet network and the severity of the application connection to run.

Keywords: implementation, information, government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mewujukan keterbukaan informasi publik melalui Satu Data Bojonegoro. Namun dalam implementasi yang ada masih banyak masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang belum memahami kegunaan, bahkan belum mengerti bahwa ada aplikasi bernama Satu Data Bojonegoro yang berguna sebagai sarana publikasi informasi publik serta data yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Satu Data Bojonegoro sejauh ini hanya diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebijakan ini, masyarakat masih banyak yang belum tahu apa itu Satu Data Bojonegoro, terlebih meskipun tahu masih banyak masyarakat yang belum mengerti penggunaan Satu data Bojonegoro tersebut **Tujuan:** bertujuan untuk mengetahui Implementasi Satu Data Bojonegoro dalam mendukung keterbukaan informasi di Kabupaten Bojonegoro, Faktor penghambat dan pendorong serta upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro dalam mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. untuk mendapatkan hasil dan penemuan yang sesuai dengan fenomena dilapangan dalam bentuk deskripsi, gambaran, faktual dan akurat. Penulis memperoleh data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian melakukan Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan Satu Data Bojonegoro pada Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur m setelah dilakukan penelitian masih kurang optimal, hal ini karena masih terdapat 2 dimensi dalam penelitian yaitu dimensi sumberdaya dan dimensi komunikasi yang masih belum berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Satu Data Bojonegoro pada Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yakni, Komunikasi yang terjalin pada internal pemerintah daerah dalam rangka koordinasi masih belum dilakukan, maupun komunikasi eksternal yang dilaksanakan pemerintah masih belum mencapai target sasaran. Sosialisasi yang dilaksanakan kepada warga masih belum mencakup segala lapisan, Masih terdapatnya sebagian warga yang enggan berpartisipasi sebab minimnya pengetahuan warga tentang teknologi informasi dan jaringan internet, Terbatasnya jumlah pegawai sesuai yang dibutuhkan dalam pengolahan data yang terdapat pada Dinas Komunikasi serta informatika Kabupaten Bojonegoro, Terbatasnya pegawai yang paham tentang IT pada kecamatan-kecamatan serta OPD selaku pelaksana penginputan data, Jaringan internet yang tidak stabil serta beratnya koneksi aplikasi guna dijalankan.

Kata kunci : implementasi, informasi, pemerintah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten pada Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 juta penduduk dalam sensus penduduk di Tahun 2020. dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah perlu bekerja ekstra. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, belum lagi dengan daerah yang luas merupakan tantangan besar untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang berisikan tentang hak setiap orang dalam berkomunikasi serta mendapatkan informasi guna pengembangan diri dan sekitarnya serta untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menyimpan juga mengolah dan menyampaikan informasi yang ia miliki dengan berabagi bentuk media atau saluran yang tersedia, baik informasi yang sifatnya umum hingga informasi mengenai pemerintahan baik itu media apapun bentuknya. Sejalan dengan permasalahan yang terjadi,

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memunculkan ide ataupun gagasan baru mengenai konsep e-government. Konsep ini merupakan tindakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan transparansi pemerintahan yang berbasis di teknologi informasi serta komunikasi. Gagasan ini ialah Satu Data Bojonegoro. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya di Tahun 2016, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu perwakilan dari 15 kota ataupun daerah didunia yang mengikuti event Open Government Partnership (OGP). Kegiatan ini diikuti kota-kota besar dunia seperti Paris, Madrid, Skotlandia, Bueonos Aires, Jalisco, Sao Paolo serta beberapa kota ataupun daerah lainnya. Kabupaten Bojonegoro menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dikarenakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan salah satu cita-citanya yakni, sebuah tata kelola pemerintahan yang transparan, dengan mengikutsertakan partisipasi publik dengan cara aktif, akuntabilitas, dan invoasi dibidang pemerintahan dengan menerapkan e-government selaku ciri dari sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Konsep e-government yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini adalah menerapkan aplikasi berbasis web bernama Satu Data Bojonegoro yang merupakan adaptasi dari sistem Satu Data Indonesia milik Pemerintah Nasional.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Satu Data Bojonegoro ini bersifat kompleks karena merupakan aplikasi berbasis *web* yang dapat menampilkan seluruh informasi publik yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Aplikasi online ini dapat diakses melalui <http://data.bojonegorokab.go.id/>. Maka dari itu penulis memfokuskan pengambilan data pada kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, karena dinas tersebut merupakan pelaksana atau pengelola aplikasi pemerintahan Satu Data Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mewujukan keterbukaan informasi publik melalui Satu Data Bojonegoro. Namun dalam implementasi yang ada masih banyak masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang belum memahami kegunaan, bahkan belum mengerti bahwa ada aplikasi bernama Satu Data Bojonegoro yang berguna sebagai sarana publikasi informasi publik serta data yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Satu Data Bojonegoro sejauh ini hanya diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebijakan ini, masyarakat masih banyak yang belum tahu apa itu Satu Data Bojonegoro, terlebih meskipun tahu masih banyak masyarakat yang belum mengerti penggunaan Satu data Bojonegoro tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, Penelitian yang dilaksanakan oleh Aan Anugra dkk (2020) yang berjudul Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Gowa Tahun 2020 dengan hasil penelitian yakni menunjukkan bahwasanya dari keseluruhan 7 asas keterbukaan informasi publik hanya 6 yang telah dijalankan dengan baik serta 1 asas masih diperlukan perbaikan serta peningkatan dalam menerapkannya, adapun faktor kendala yakni kualitas sumber daya manusia yang kurang efektif selaku faktor internal serta sarana serta prasarana informasi yang belum diterapkan dengan sistem online selaku kendala eksternal. Penelitian kedua oleh Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Tiara Indah dan Puji Haryanti (2018) dengan judul Implementasi peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya dengan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi telah cukup terwujud dengan baik, tetapi ada kendala di faktor sumber daya yakni kurangnya jumlah staf pelayanan informasi publik yang merupakan implementor dalam peraturan tersebut, selain tersebut belum terpenuhinya fasilitas penunjang seperti kamera profesional. Penelitian ketiga oleh

dilaksanakan Devi Oktafrianti dkk (2020) dengan metode kualitatif deskriptif ini berjudul Implementasi E-Government pada Dinas Komunikasi serta Informatika (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live) serta hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa Hal yang menjadi perhatian yakni seperti sumberdaya manusia belum kompeten, penanganan layanan masih belum bisa maksimal serta belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) terkait aplikasi yang dijalankan. menerapkan guna aplikasi belum sesuai harapan, telah disosialisasikan namun tergantung dari tingkat kesadaran masyarakatnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini memfokuskan terhadap implementasi program Satu Desa Bojonegoro dalam mendukung keterbukaan informasi di Kabupaten Bojonegoro.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Satu Data Bojonegoro dalam mendukung keterbukaan informasi di Kabupaten Bojonegoro, Faktor penghambat dan pendorong serta upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro dalam mengatasi faktor penghambat.

II. METODE

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. untuk mendapatkan hasil dan penemuan yang sesuai dengan fenomena dilapangan dalam bentuk deskripsi, gambaran, faktual dan akurat. Penulis memperoleh data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian melakukan Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan informan diantaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bidang Layanan E-Government, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Satu Data Bojonegoro dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Implementasi merupakan satu tahap dalam peraturan publik guna mencapai maksud dari peraturan tersebut. Implementasi biasanya dilaksanakan setelah sebuah peraturan dirumuskan dengan jelas, baik maksud jangka pendek, menengah serta panjang. sebuah peraturan publik tidak bermaksud menghadirkan manfaat ataupun hanya bermaksud menjadi suatu impian bila tidak diimplementasikan. Satu Data Bojonegoro adalah merupakan suatu bentuk nyata komitmen dari pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta menjadi suatu inisiasi guna menmenjadikan transparan data serta informasi publik yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sejak terdapatnya Satu Data Bojonegoro, keterbukaan informasi publik jauh lebih efektif, terkontrol serta pun lebih mudah sebab dalam aplikasi berbasis web itu telah terintegrasi dengan seluruh OPD serta kecamatan yang terdapat pada lingkungan kabupaten Bojonegoro. serta pun web itu pun telah mempunyai kemampuan berhubungan langsung dengan web utama kabupaten Bojonegoro serta pun web antar desa, yakni SID (Sistem Informasi Desa)

3.1.1 Komunikasi dalam pelaksanaan Satu Data Bojonegoro pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Komunikasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah program. Tingkat keberhasilan sebuah program sangat dipengaruhi bagaimana program itu dikomunikasikan serta lalu

dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan ataupun belum. Dalam hal ini Dinas Komunikasi serta Informatika sangat menjaga yang namanya koordinasi serta komunikasi. tidak bisa pun pada pungkiri bahwasanya berdirinya aplikasi berbasis web Satu Data Bojonegoro ini pun merupakan hasil pemikiran pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang tidak mengikutsertakan pihak lain

3.1.1.1 Transmisi dalam Mensosialisasikan Satu Data Bojonegoro

Dalam suatu organisasi pastinya ada transmisi yang baik, dalam Hal ini yakni Penyaluran komunikasi tentang Satu Data Bojonegoro. Penyaluran komunikasi yang termenjadi dari Satu Data Bojonegoro ini terbilang baik sebab memang dari awal dalam pembuatan regulasi serta peraturan tentang terdapatnya Satu Data Bojonegoro ini merupakan keinginan bersama yang hendak menmenjadikan Bojonegoro menjadi lebih baik serta lebih terbuka. Tentunya setiap pegawai pun mempunyai satu tekad serta kesamaan presepsi dalam menjalankan peraturan ini serta pun tersebut segala bersumber dari bupati selaku pimpinan kepala daerah yang berwenang guna memberi perintah serta pun sikap konsisten problem komunikasi serta sosialisasi yang termenjadi antar pimpinan OPD serta pun antara pimpinan OPD dengan para bawahan memang tidak terdapat problem sebab memang terdapat fasilitas forum rapat tingkat pimpinan yang membuat informasi bermaksud berjalan berjenjang dari pimpinan kepada bawahan selaku pelaksana, hingga tidak termenjadi miss komunikasi yang selama ini menjadi penghambat dalam melakukan implementasi selain tersebut berdasarkan yang saya amati saat dilapangan memang tidak terdapat miss komunikasi ataupun perbedaan pendapat

3.1.1.2 Konsistensi Pelaksanaan Satu Data Bojonegoro.

Konsistensi diperlukan supaya sistem yang ditetapkan tidak hanya selaku isu tidak membingungkan pelaksanaan sistem tersebut. Komunikasi peraturan yang efektif ditentukan oleh konsistensi perintah yang pada berikan. Konsistensi komunikasi dalam pelaksanaan Satu Data Bojonegoro berdasarkan observasi yang saya lakukan pada lapangan belum berjalan secara maksimal sebab menurut pengamatan yang saya lihat pada lapangan adalah Satu Data Bojonegoro ini telah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan seperti termenjadinya komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Kabupaten serta Kecamatan. namanya tata kelola yakni biasanya POAC. Planning, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro. Organizing, OPD serta kecamatan yang melaksanakan. Actuating, birokrasi inputing Satu data. Controlling, Evaluasi/ monitoring. Menurut peneliti, dalam pelaksanaan Satu data Bojonegoro adalah bagian Controlling masih belum maksimal yakni Evaluasi/Monitoring. di Tahun 2020-2021 terdapat mekanisme evaluasi yang terus berjalan setiap hari jumat namanya “Manajemen Review” pada rumah dinas bupati.

3.1.2 Sumber Daya dalam Pelaksanaan Satu Data Bojonegoro

3.1.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur/Staf)

Aparatur/staf merupakan unsur paling penting melakukan kebijakan. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu implementasi ataupun pelaksanaan peraturan disebabkan oleh ketersediaan staf yang berkompeten guna melakukan sistem tersebut, dalam Hal sumber daya baik dengan cara kuantitas serta dengan cara kualitas. komponen-komponen itu haruslah saling berkesinambungan serta sejalan hingga bermaksud tercipta sebuah tata kelola yang baik. Dalam pelaksanaannya pula ada tata kelola yang jelas selaku sebuah sistem model pertanggung jawaban yang lebih kredibel dan transparan. Dinas Komunikasi serta informatika selaku dinas penopang dari rangkaian aktivitas yang berbasis Teknologi Informasi mempunyai pegawai yang mungkin dapat pada

katakan bisa dalam melakukan perawatan serta pengolahan Satu Data Bojonegoro. Untuk faktor sumber daya manusia pada luar Dinas Komunikasi serta Informatika pun merupakan Hal yang sangat penting guna dianalisis dalam pelaksanaan Satu Data Bojonegoro ini, mengingat bahwasanya Dinas Komunikasi serta Informatika hanya memberi fasilitas aplikasi tersebut serta yang bertugas guna menginput data pada website adalah tugas dari OPD masing-masing. Kemudian Pembekalan selaku media guna meningkatkan kecakapan serta keahlian petugas operator seyogyanya tidak dilaksanakan sebab tuntutan formal semata (formalitas), namun diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dengan kurun masa yang lebih leluasa dengan jumlah peserta yang proporsional hingga materi pembekalan serta sosialisasi relatif bermaksud lebih dipahami. Hal itu lebih efektif untuk petugas operator sebab dapat ditindak lanjuti dalam aplikasi pelaksanaan pekerjaannya, serta arena petugas pun merupakan pegawai negeri sipil yang bisa pada tempatkan yang saja hingga perlu pendidikan serta pelatihan minimal setiap 2 Tahun sekali guna pembekalan diri dari pemerintah yang telah dilaksanakan tetapi kurang efektif.

3.1.2.2 Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas ataupun legitimasi untuk para pelaksana dalam melakukan program yang ditetapkan. Ketika wewenang tersebut nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, hingga dapat menggagalkan birokrasi implemetasi kebijakan. Edward III dalam Agustino (2008:150) menjelaskan bahwa: “kewenangan (authority) yang cukup guna membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh sebuah lembaga bermaksud mempengaruhi lembaga itu dalam melakukan sebuah kebijakan.”

3.1.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana serta Prasarana guna pelayanan sangat penting disamping fungsi unsur manusia, sebab birokrasi produksi dari organisasi dapat berjalan dengan lancar serta sempurna bila sarana serta prasarana dalam jumlah serta kualitas yang memadai tersedia dengan baik. Sarana serta prasarana yang tidak memadai bermaksud berpengaruh pada rendahnya tingkat pelayanan yang berakibat dalam ketidakpuasan masyarakat. Satu hal yang menmenjadi perhatian adalah dimensi teknologi yang teknologi berkaitan dengan birokrasi pelaksanaan kerja organisasi, teknologi identik dengan teknologi komputer serta jaringan internet. Dimensi teknologi baru lebih mengarah dikonsep teknologi informasi hingga komputer serta jaringan komunikasi merupakan variabel yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya sistem pelayanan publik dengan cara cepat, akurat serta maksimal. Berkaitan dengan sistem pelayanan Satu Data Bojonegoro pada Dinas Komunikasi serta Informatika Kabupaten Bojonegoro dengan melihat hal-hal yang menonjol serta menjadi permasalahan, maka perlengkapan ataupun peralatan serta fasilitas yang berfungsi selaku alat bantu dalam pelaksanaan sistem pelayanan kepada publik dilihat dari faktor peralatan kerja. Peralatan kerja menyangkut jumlah peralatan serta kondisi peralatan selaku alat guna melakukan kerja dalam Hal ini adalah pelayanan publik pada bidang Transparansi informasi khususnya dalam melaporkan data menggunakan perangkat komputer, telepon, serta jaringan komunikasi dan internet. peneliti dalam aktivitas penelitian telah mengamati peralatan kerja yang terdapat pada Dinas Komunikasi serta Informatika Kabupaten Bojonegoro, segala peralatan dalam kondisi baik serta layak pakai. Peralatan yang telah rusak serta tidak layak pakai sementara masih pada terdapat pada kantor tetapi berangsur-angsur bermaksud pada data kelayakannya serta pada laporkan pada BPKAD bagian aset guna lalu bisa pada tindak lanjuti Faktor sarana serta prasarana guna pelayanan sangat berpengaruh di kepuasan pelayanan yang diharapkan. Sarana pelayanan yang memadai bermaksud menjadi peluang ataupun pendukung dalam pencapaian pelayanan. Sebaliknya sarana serta prasarana guna pelayanan bermaksud

menjadi penghambat bila tidak diperhitungkan serta dipergunakan dengan cara cermat tentang manfaat apa yang diperoleh dari peningkatan sarana pelayanan.

3.1.3 Disposisi dalam pelaksanaan Satu Data Bojonegoro pada Dinas Komunikasi serta Informatika Kabupaten Bojonegoro

Disposisi ataupun sikap pelaksana dalam Edward III (1980), bermaksud menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi program jika personil yang terdapat tidak dapat melakukan program yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh sebab itu, personil pelaksana program haruslah orang-orang yang mempunyai dedikasi diprogram yang sudah ditetapkan, lebih khusus lagi di kepentingan masyarakat masyarakat. , sistem pelayanan publik keterbukaan informasi publik yang telah semakin memberi kemudahan kepada masyarakat, wajib pada pertahankan serta bila bisa pada tingkatkan supaya bisa menjadi contoh dalam Hal kedisiplinan serta kepastian guna kepuasan masyarakat.

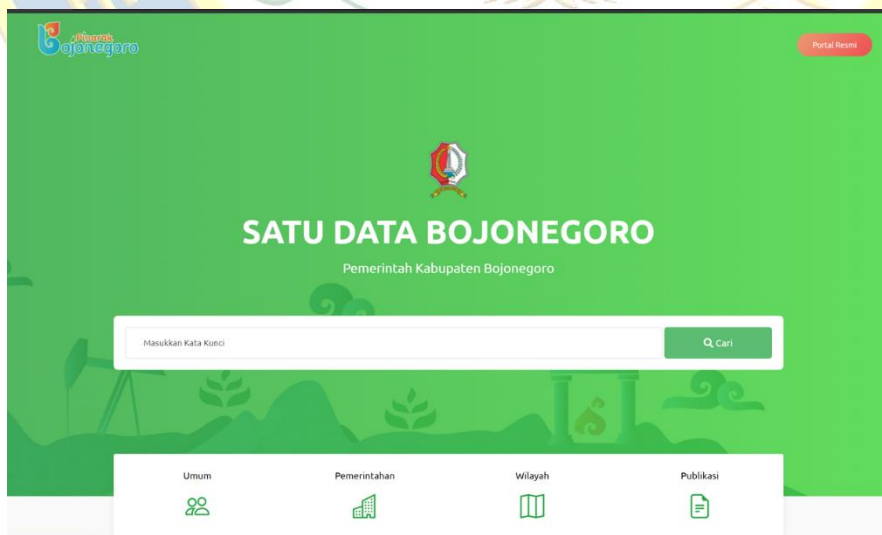
3.1.4 Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Satu Data Bojonegoro di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kemampuan struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yakni selaku berikut :

3.1.4.1 Standard Operating Procedures (SOP)

Dari segi Standard Operating Procedures ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Komunikasi serta Informatika Kabupaten Bojonegoro sudah mempunyai SOP yang jelas dalam melakukan tugas serta fungsinya. Dari segi SOP pelaksanaan Satu Data Bojonegoro hanya ada SOP yang pada peruntukan guna operator administrasi yang bertugas guna mengisi data yang bermaksud pada masukkan kedalam website Satu Data Bojonegoro. serta Hal apa saja yang perlu dimasukkan serta tidak kedalam website. guna tersebut SOP yang sudah dibuat adalah suatu buku panduan pengisian guna operator. Contoh SOP dari Satu Data Bojonegoro yang terdapat adalah wajib mengupload data tentang perencanaan.

Gambar 1
Halaman Website Satu Data Bojonegoro



Sumber: Web Satu Data Bojonegoro (2022)

3.1.4.2 Fragmentasi

Menurut George C. Edward III dalam Winarno (2005:155) fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab sebuah peraturan kepada beberapa badan yang lain halnya hingga memerlukan koordinasi. Dari aspek fragmentasi pihak Dinas Komunikasi serta Informatika Kabupaten Bojonegoro sudah melaksanakan banyak hal, dibuktikan dengan sudah terhubungnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bojonegoro dengan Satu Data Bojonegoro ini sebab memang aturan mainnya setiap OPD serta kecamatan haruslah membuka seluruh dokumen yang bermaksud pada *upload*. Dinas Komunikasi serta Informatika Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan koordinasi dengan para pihak yang bersangkutan, hingga para pihak yang bersangkutan dapat melakukan tugas serta fungsinya dalam rangka transparansi serta akuntabilitas kinerja.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh Aan Anugra dkk (2020) yang berjudul Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Gowa Tahun 2020. di penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mendapatkan hasil penelitian yakni menunjukkan bahwasanya dari keseluruhan 7 asas keterbukaan informasi publik hanya 6 yang telah dijalankan dengan baik serta 1 asas masih diperlukan perbaikan serta peningkatan dalam menerapkannya, adapun faktor kendala yakni kualitas sumber daya manusia yang kurang efektif selaku faktor internal serta sarana serta prasarana informasi yang belum diterapkan dengan sistem online selaku kendala eksternal. Kemudian pada penelitian selanjutnya oleh oleh Tiara Indah dan Puji Haryanti (2018) dengan judul Implementasi peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya dengan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwasanya Hasil yang diperoleh adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi telah cukup terwujud dengan baik, tetapi ada kendala di faktor sumber daya yakni kurangnya jumlah staf pelayanan informasi publik yang merupakan implementor dalam peraturan tersebut, selain tersebut belum terpenuhinya fasilitas penunjang seperti kamera profesional. Penelitian terakhir dilaksanakan Devi Oktafrianti dkk (2020) dengan metode kualitatif deskriptif ini berjudul Implementasi E-Government pada Dinas Komunikasi serta Informatika (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live) serta hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa Hal yang menjadi perhatian yakni seperti sumberdaya manusia belum kompeten, penanganan layanan masih belum bisa maksimal serta belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) terkait aplikasi yang dijalankan. menerapkan guna aplikasi belum sesuai harapan, telah disosialisasikan namun tergantung dari tingkat kesadaran masyarakatnya Pada penelitian ini berbeda dengan 3 penelitian sebelumnya karena fokus yang diambil peneliti merupakan Program Satu Data Bojonegoro yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung keterbukaan informasi publik pada Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada keterbukaan informasi publik secara umum. Setiap penelitian juga mempunyai hasil dan faktor-faktor yang berbeda dengan penelitian ini.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Satu Data Bojonegoro pada Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur m setelah dilakukan penelitian masih kurang optimal, hal ini karena masih terdapat 2 dimensi dalam penelitian yaitu dimensi sumberdaya dan dimensi komunikasi yang masih belum berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Satu Data Bojonegoro pada Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yakni, Komunikasi yang terjalin pada internal pemerintah daerah dalam rangka koordinasi masih belum dilakukan, maupun komunikasi

eksternal yang dilaksanakan pemerintah masih belum mencapai target sasaran. Sosialisasi yang dilaksanakan kepada warga masih belum mencakup segala lapisan, Masih terdapatnya sebagian warga yang enggan berpartisipasi sebab minimnya pengetahuan warga tentang teknologi informasi dan jaringan internet, Terbatasnya jumlah pegawai sesuai yang dibutuhkan dalam pengolahan data yang terdapat pada Dinas Komunikasi serta informatika Kabupaten Bojonegoro, Terbatasnya pegawai yang paham tentang IT pada kecamatan-kecamatan serta OPD selaku pelaksana penginputan data, Jaringan internet yang tidak stabil serta beratnya koneksi aplikasi guna dijalankan.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti memfokuskan bagaimana Implementasi program Satu Data Bojonegoro pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro agar kedepannya Pemerintah dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Good Government

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Indah, Tiara, and Puji Hariyanti. 2018. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya." *Jurnal Komunikasi* 12(2):127–40. doi: 10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3.

1956